

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang terdapat didalam BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa dengan Rasio Kemandirian Keuangan yang selama 5 tahun berada di bawah 25 %, yaitu dengan rata-rata 9,1 % selama kurun waktu 2001-2005, menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang masih rendah. Pola hubungan yang dibentuk dalam melaksanakan otonomi daerah adalah Instrukturif yang berarti masih tergantung oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan Pemerintah Daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan di dalam anggaran dikatakan sangat efektif karena dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2001-2005 rasio efektivitas berada diatas 100 %. Efektif karena realisasi selalu melebihi target yang telah ditentukan, hal ini tentu merupakan kabar baik didalam merealisasikan PAD. Namun dilihat secara keseluruhan, efektivitas mengalami penurunan secara fluktuatif, yaitu dengan rata-rata sebesar 114,2 %.

Dari sudut pandang efisiensi, masih dapat dikatakan tidak efisien karena jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD, perbandingannya selalu berada diatas 100 % yaitu dengan rata-rata sebesar 179,7 %. Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk terus mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam anggaran daerah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang masih kurang baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

V. 2 Keterbatasan

Didalam skripsi ini perlu disadari bahwa ada keterbatasan kemampuan peneliti yang dimiliki selama penelitian dilakukan, antara lain :

1. Dalam melakukan penelitian, penulis hanya berfokus pada satu Rasio Kemandirian dari 4 rasio keuangan yang ada, yaitu dengan Rasio Kemandirian Keuangan dan tidak melihat rasio keuangan yang lain, seperti : Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Hal ini memungkinkan terjadinya kekurangan dalam melakukan analisis terhadap data keuangan yang bersumber pada APBD sehingga dapat mengurangi kelengkapan dalam menyimpulkan hasil.
2. Jangka waktu yang dipakai oleh peneliti sebagai periode waktu penelitian tergolong cukup singkat yaitu hanya 5 tahun, dari tahun anggaran 2001-2005, mengingat otonomi daerah berdasarkan UU No.22 dan 25 tahun 1999 (yang sekarang sudah diganti dengan UU No.32 dan 33 tahun 2004) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2000. Periode yang singkat ini tentu akan mempengaruhi hasil akhir penelitian dan tidak dapat seluruhnya menggambarkan kemampuan Kabupaten Batang dalam menghadapi otonomi daerah.
3. Kemampuan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah tidak hanya dilihat dari mengukur rasio keuangannya yang dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian. Kemampuan menghadapi otonomi daerah juga didukung oleh

potensi lainnya seperti kemampuan Pemerintah Daerah lainnya mengelola potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya secara optimal.

V.3 Saran

Setelah melihat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti seperti yang dijelaskan diatas, maka berikut ini adalah saran-saran yang mungkin dapat membantu Pemerintah Kabupaten Batang maupun untuk penelitian selanjutnya :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

- a. Perlu diupayakan tindakan yang bersifat intensif dan ekstensif terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk meningkatkan kemandirian di bidang pendanaan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Tindakan yang bersifat intensif antara lain : (1) melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik tertib dalam pemungutan, administrasi maupun penyeteroran (2) melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparat pemerintah (3) melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.

Sedangkan ekstensifikasi antara lain dilakukan dengan cara : (1) meninjau kembali tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk dilakukan perubahan (2) mengadakan studi banding ke daerah lain yang memiliki sistem

kemandirian yang lebih baik guna mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan (3) menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan yang potensial dengan lebih memprioritaskan pada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.

- b. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, Kabupaten Batang harus dapat mengandalkan PAD yang dimilikinya dengan meningkatkan kemampuan administrasi pemungutan maupun administrasi perencanaan dan pengawasannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangannya hendaknya digunakan keseluruhan rasio keuangan yang ada, misalnya rasio efektifitas PAD, kemandirian pembiayaan dan sebagainya sehingga rasio keuangan yang satu dapat mendukung rasio keuangan yang lain dan keseluruhan rasio keuangan dapat menilai keseluruhan APBD dilihat dari tujuan rasio keuangan masing-masing.
- b. Periode waktu dalam melakukan penelitian hendaknya cukup (lebih dari 5 tahun) sehingga kecenderungan (trend) yang terjadi dapat dilihat secara lengkap yang akan menggambarkan keseluruhan keadaan yang terjadi di suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah sehingga kesimpulan yang ditarik dapat lebih akurat.
- c. Dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi otonomi

daerah, sebaiknya tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, dalam hal ini adalah potensi sumber daya keuangan yang dilihat dengan rasio kemandirian tetapi sebaiknya penelitian yang didukung oleh bidang-bidang lain yang mendukung, misalnya dapat dilihat dari segi potensi sumber daya manusianya, yaitu sejauh mana profesionalitas pegawai mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran yang terjadi dalam APBD.



DAFTAR PUSTAKA

- Adirinekso, Gidion, *Kerangka Teori Perencanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Masa Depan (Studi Hubungan Pusat dan Daerah)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Edisi 4 Tahun III, 2003. ✓
- Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004, www.djpkpd.go.id/e-report/
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, 2001a, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Hariadi, Sugeng, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.5 No.1 halaman 25, 2002. ✓
- Mahi, Raksaka, *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.VI No.01, 2005 Juli, hal 39-49. ✓
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Subagyo, Herry, *Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, 2003, www.ekonomirakyat.org ✓
- Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Jakarta, 2000.
- _____, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- _____, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ BPS, APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2005.





**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2000 S/D 2005**

KODING	URAIAN	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.626.245.000	5.734.792.505	12.136.000.000	14.368.778.148	17.210.000.000	21.364.881.331	20.103.000.000	23.308.567.815	22.888.980.500	23.610.802.641	21.366.204.490	23.301.040.806
	PAJAK DAERAH	1.390.000.000	1.697.003.889	2.326.500.000	2.508.742.611	3.248.500.000	3.511.313.212	4.022.343.500	4.132.037.866	4.845.000.000	4.938.968.744	5.637.000.000	5.562.879.380
1 01	Pajak Hotel	185.000.000	191.829.982	275.000.000	300.903.411	350.000.000	96.965.355	107.000.000	114.564.500	127.000.000	132.436.580	137.000.000	143.451.500
1 02	Pajak Restoran	Gabung Pj. Hotel	Gabung Pj. Hotel	Gabung Pj. Hotel	Gabung Pj. Hotel	Gabung Pj. Hotel	260.191.450	296.000.000	305.188.100	323.000.000	328.909.100	332.000.000	338.966.600
1 03	Pajak Hiburan	20.000.000	22.258.500	31.500.000	32.267.500	36.000.000	36.246.500	36.000.000	36.104.750	32.000.000	32.161.000	35.000.000	35.193.000
1 04	Pajak Reklame	16.000.000	16.000.599	25.000.000	29.057.438	32.500.000	33.389.350	37.500.000	38.880.179	42.500.000	49.023.006	55.000.000	63.882.305
1 05	Pajak Penerangan Jalan	1.030.000.000	1.064.148.380	1.515.000.000	1.635.540.390	2.500.000.000	2.748.935.510	3.300.000.000	3.379.708.395	4.100.000.000	4.169.764.206	4.850.000.000	4.749.044.335
1 06	Pajak Pengamb Bahan Galian Gol C	214.000.000	270.500.241	300.000.000	304.390.574	120.000.000	122.382.835	140.000.000	146.795.642	147.000.000	151.169.822	144.000.000	144.885.640
	Pajak Pengamb Air Bawah Tanah & APT	125.000.000	132.108.187	180.000.000	206.553.298	210.000.000	213.202.212	-	-	-	-	-	-
1 07	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	58.186.500	63.138.400	73.500.000	75.505.000	84.000.000	87.456.000
1 08	Cadangan Pajak	-	-	-	-	-	-	47.657.000	47.657.900	-	-	-	-
2	RETRIBUSI DAERAH	3.092.500.000	3.199.492.530	5.673.689.000	5.875.241.231	6.314.715.000	6.495.993.433	7.790.463.500	8.293.864.100	9.511.882.000	10.232.812.024	11.394.858.500	12.074.969.198
2 01	Ret. Pelayanan Kesehatan	1.713.000.000	1.727.279.534	2.610.000.000	2.714.228.232	3.350.000.000	3.468.846.155	4.217.271.500	4.423.701.357	5.424.891.000	6.040.131.513	7.040.000.000	7.260.519.721
	A. Rumah Sakt Umum (RSUD)	1.240.000.000	1.246.708.291	2.110.000.000	2.212.034.987	2.850.000.000	2.921.619.331	3.600.000.000	3.796.466.050	4.600.000.000	5.006.400.563	5.415.000.000	5.461.691.779
	B. DINKESOS (PUSKESMAS)	475.000.000	480.571.243	500.000.000	502.193.245	500.000.000	547.226.824	617.271.500	627.235.307	824.691.000	1.033.750.950	1.625.000.000	1.798.827.942
2 02	Ret. Pelayanan Persampahar/Kebersihan	92.000.000	93.427.345	121.980.000	131.320.150	144.000.000	149.738.535	151.000.000	152.009.715	205.400.000	230.673.515	217.000.000	239.639.320
2 03	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP/PKK	115.000.000	145.748.000	770.000.000	925.426.000	205.000.000	121.614.000	95.502.000	116.044.000	191.796.000	225.759.000	222.672.000	466.020.000
2 04	Ret. Penggantian Biaya Cetak Akte	Gabung Ctk. KTP	Gabung Ctk. KTP	Gabung Ctk. KTP	Gabung Ctk. KTP	Gabung Ctk. KTP	126.212.000	97.000.000	125.498.000	105.000.000	130.047.000	105.000.000	150.330.000
2 07	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jln Umum	42.000.000	44.141.300	61.195.000	62.905.150	70.000.000	70.084.700	61.318.000	62.163.000	66.700.000	66.723.000	71.000.000	71.211.000
2 08	Ret. Pelayanan Pasar	595.000.000	632.273.481	885.000.000	897.206.230	1.038.000.000	1.057.598.975	1.222.000.000	1.239.791.890	1.287.130.000	1.312.025.175	1.430.250.000	1.449.861.290
2 09	Ret. Pengujian Kencokan Bermotor	-	-	-	-	104.000.000	106.727.450	124.502.000	131.368.500	128.015.000	139.177.000	142.063.000	152.452.500
2 13	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000	28.792.500	588.174.000	600.174.740	633.465.000	622.365.200	733.303.000	792.210.275	988.284.000	917.266.200	910.542.000	829.972.825
2 13	Sewa Tanah dan Bangunan	111.000.000	110.978.200	-	-	-	155.148.150	194.760.000	211.102.750	428.134.000	438.606.200	331.736.000	247.519.900
2 13	Sewa Alat Berat	-	-	-	-	-	20.020.000	58.045.000	68.140.000	70.000.000	74.440.000	71.000.000	73.995.000

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2000 S/D 2005**

KODING	URAIAN	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2 13	Sewa Rumah Dinas	-	-	-	-	-	15.025.000	15.000.000	16.150.000	16.000.000	16.550.000	16.000.000	16.500.000
2 13	Sewa Lapangan Tenis	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.050.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	2.700.000
2 13	Sewa Gedung/Ruangan/Aula & Asrama	3.500.000	3.500.000	-	-	-	5.862.500	6.000.000	6.629.000	1.500.000	6.040.000	2.300.000	2.245.000
2 13	Sewa Lahan (Tanah, Tambak & sejenis)	-	-	-	-	-	409.600.700	433.500.000	432.363.300	454.144.000	344.200.100	457.500.000	461.662.900
2 13	Sewa Lahan di Tempat Rekreasi	-	-	-	-	-	-	8.000.000	5.362.500	8.000.000	8.092.500	8.000.000	7.000.000
2 13	Direksi Krt dan Papan Nama Proyek	-	-	-	-	-	16.708.850	15.000.000	49.412.725	5.000.000	25.837.400	20.000.000	18.350.025
2 16	Retribusi Jasa Usaha Terminal	90.000.000	79.861.200	107.000.000	115.315.600	125.000.000	125.225.300	139.740.000	140.059.500	147.672.000	147.907.500	161.503.500	161.981.000
2 17	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	24.000.000	26.206.300	35.640.000	37.774.900	42.000.000	43.204.500	51.000.000	51.036.500	54.500.000	54.527.000	57.500.000	57.800.000
2 19	Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	5.000.000	4.500.000	5.500.000	6.020.000	7.500.000	7.665.000	7.525.000	7.595.000	7.900.000	7.945.000	7.900.000	7.980.000
2 20	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)	62.500.000	64.991.000	85.000.000	85.002.500	86.000.000	64.222.000	90.000.000	76.592.000	75.000.000	76.452.500	76.000.000	76.275.000
2 21	Ret. Tempat Pendaratan Kapal	7.000.000	5.246.200	9.200.000	9.205.000	10.000.000	10.005.800	10.000.000	7.537.100	7.500.000	2.491.500	7.500.000	7.510.600
2 22	Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi & Olah Raga	40.000.000	45.330.120	70.000.000	73.999.030	94.000.000	104.903.050	132.500.000	128.624.100	153.500.000	156.720.350	167.000.000	167.595.610
2 26	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	57.500.000	80.268.700	100.000.000	116.507.000	135.000.000	166.237.400	150.000.000	163.845.300	188.000.000	143.503.350	155.000.000	157.230.850
2 28	Ret. Ijin Gangguan (HG)	50.000.000	56.908.500	150.000.000	153.200.849	165.000.000	172.910.368	170.000.000	166.416.746	135.000.000	135.020.027	135.000.000	137.125.510
2 29	Ret. Izin Trayek	-	-	-	-	13.500.000	15.073.000	18.300.000	19.412.000	12.940.000	19.967.500	19.500.000	29.514.500
2 30	Ret. Pelayanan Administrasi	-	-	-	-	-	-	251.000.000	414.531.217	251.404.000	342.295.369	277.928.000	464.271.472
2 31	Ret. Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	50.000.000	50.040.150	75.000.000	46.955.650	85.000.000	55.250.000	22.000.000	22.000.000	23.000.000	23.099.750	24.000.000	24.110.500
2 32	Retribusi Ijin Usaha	-	-	-	-	7.250.000	6.310.000	15.500.000	15.802.900	18.250.000	18.589.775	18.500.000	30.187.500
2 33	Ret. Ijin Jasa Usaha Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-	4.500.000	10.550.000	12.000.000	12.420.000	14.000.000	15.060.000
2 34	Ret. Ijin Jasa Usaha Penyiaran	-	-	-	-	-	-	26.500.000	27.065.000	30.000.000	30.050.000	35.000.000	36.195.000
2 35	Ret. Ijin Jasa Usaha Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	82.125.000
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	204.000.000	207.766.498	802.000.000	808.098.101	1.008.000.000	1.011.481.286	743.938.000	690.392.019	682.662.000	630.024.579	393.619.000	393.619.000
1 01	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	135.000.000	135.000.000	550.000.000	550.000.000	682.000.000	682.100.000	338.938.000	338.195.000	308.662.000	308.662.978	393.619.000	393.619.000

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2000 S/D 2005**

KODING	URAIAN	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)
1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.000.000	125.392.906	304.560.000	110.972.820	314.891.880	372.311.730	334.830.000	820.830.304	673.954.000	392.432.420	673.954.000	599.053.405
	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	-	-	277.486.000	342.882.527	324.882.000	462.483.496	324.882.000	221.158.409	324.882.000	307.052.685
1 02	Penerimaan dr Sektor Pertambangan Gas Alam	-	-	-	-	17.905.880	9.948.163	9.948.000	19.222.553	9.948.000	13.497.918	9.948.000	40.753.718
1 02	SDA Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	339.124.255	339.124.000	157.520.783	339.124.000	241.688.091
	SDA Tambang Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.310	-	9.558.911
	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	6.000.000	107.756.190	10.000.000	12.251.240	19.500.000	19.481.040	-	-	-	-	-	-
	Iuran Hasil Hutan (IHH)	14.000.000	17.636.716	17.636.000	1.422.179	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iuran Hasil Hutan (IHH) dari pusat	-	-	276.924.000	97.289.401	-	-	-	-	-	-	-	-
	DANA RUTIN DAERAH	42.948.742.000	40.826.371.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DANA ALOKASI UMUM	5.902.603.000	5.815.371.732	211.883.526.000	211.883.526.000	211.880.000.000	212.735.649.916	224.887.381.000	224.887.874.834	222.400.000.000	222.399.000.000	222.826.000.000	222.826.000.000
3	DANA ALOKASI KHUSUS	4.952.603.000	5.008.880.177	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	12.510.000.000	12.510.000.000
3 01	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	12.510.000.000	12.510.000.000
	Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000.000	4.600.000.000
	Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.790.000.000	1.790.000.000
	Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	4.060.000.000	4.060.000.000
	- Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070.000.000	2.070.000.000
	- Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370.000.000	1.370.000.000
	- Air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000.000	620.000.000
	Bidang Perikanan & Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.000.000	930.000.000
	Bidang Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130.000.000	1.130.000.000
	PENERIMAAN LAINNYA	1.913.895.800	2.130.739.984	3.992.970.000	7.473.988.195	-	-	-	-	-	-	-	-
	BAGI HASIL PAJAK & BANT. KEUANGAN DARI PROPINSI)	-	-	-	-	8.505.340.000	12.801.572.520	13.105.627.000	14.158.568.982	12.724.403.000	14.354.426.989	13.436.934.256	16.627.478.668
01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	-	-	-	-	4.167.678.000	8.637.281.422	7.362.207.000	8.554.959.340	8.601.222.000	10.294.713.420	10.281.296.756	12.789.723.001
01	Pajak Kend Bermot. r & Bea Balik Nama K B.	-	-	-	-	4.167.678.000	8.637.281.422	3.660.815.000	4.453.574.000	4.096.956.000	5.353.942.500	5.412.499.000	7.655.671.736
01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	3.581.392.000	3.989.881.000	4.319.614.000	4.728.309.670	4.670.431.756	4.980.308.290
01	Pajak Pengambin & Pemanfaat Air Bwh Tanah	-	-	-	-	-	-	115.000.000	93.111.340	133.005.000	144.401.750	151.029.000	133.432.759
01	Pajak Pengambin & Pemanfaat Air Permukaan	-	-	-	-	-	-	5.000.000	18.393.000	51.647.000	68.059.500	17.337.000	20.310.216
	Bagi Hasil Bukan Pajak Propinsi	-	-	-	-	500.000.000	326.629.098	483.682.000	343.871.642	487.066.000	433.598.569	376.601.500	528.719.667
01	Bagi Hasil TPI	-	-	-	-	500.000.000	326.629.098	300.000.000	197.559.892	300.000.000	205.140.214	170.875.000	303.173.261
01	Kelebihan Muatan (Jembatan Timbang)	-	-	-	-	-	-	147.443.000	99.200.900	145.035.000	167.669.056	151.021.500	153.921.987
01	Sumbangan Pihak III (SP3 Kayu)	-	-	-	-	-	-	36.239.000	47.110.850	43.761.000	51.957.500	45.129.000	61.815.080
01	Tera dan Tera Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	8.270.000	8.831.799	9.576.000	9.809.339

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2000 S/D 2005**

KODING	URAIAN	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	TARGET (RP)	REALISASI (RP)
02	Bantuan Keuangan Dari Propinsi (2POA)	-	-	-	-	3.837.662.000	3.837.662.000	5.259.738.000	5.259.738.000	3.626.115.000	3.626.115.000	2.809.036.000	3.309.036.000
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-	-	-	2.235.405.000	2.392.582.449	9.721.000.000	9.721.000.000
02	Bant Dana Kontinjensi/Penyelmb dari Pemerit	-	-	-	-	-	-	-	-	2.235.405.000	2.392.582.449	9.721.000.000	9.721.000.000
03	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Penanggi Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Penanggi Korban/Kerusakan Akibat Bencana Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		65.508.164.800	65.753.567.218	234.917.260.000	242.491.610.736	246.292.759.880	259.180.918.848	272.700.861.000	279.676.191.991	275.012.138.500	280.568.879.136	295.251.063.546	306.379.928.730

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2000 S/D 2005**

KODING	URAIAN	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
RINGKASAN													
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.826.245.000	5.734.792.605	12.136.000.000	14.368.778.148	17.210.000.000	21.384.881.331	20.103.000.000	23.308.867.615	22.888.980.500	23.610.802.841	21.356.204.490	23.301.040.806
	PAJAK DAERAH	1.590.000.000	1.697.003.889	2.326.500.000	2.508.742.611	3.248.500.000	3.511.313.212	4.022.343.500	4.132.037.866	4.845.000.000	4.938.968.744	5.637.000.000	5.562.879.380
	RETRIBUSI DAERAH	3.092.500.000	3.199.492.530	5.673.689.000	5.875.241.231	6.314.715.000	6.495.993.433	7.790.463.500	8.293.864.100	9.511.682.000	10.232.812.024	11.394.858.500	12.074.969.198
	HASIL PERUSH MILIK DAERAH DAN HASIL PENGLN KEKAY DAERAH YG DIPISAHKAN	204.000.000	207.766.496	802.000.000	808.092.101	1.008.000.000	1.011.481.286	743.938.000	690.592.019	682.662.000	630.024.579	393.619.000	393.619.000
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	739.745.000	630.529.690	3.333.811.000	5.176.696.205	6.638.785.000	10.366.093.400	7.546.255.000	10.192.073.630	7.849.636.500	7.808.997.294	3.930.726.990	5.269.573.228
	DANA PERIMBANGAN	58.368.024.000	57.888.034.629	218.788.290.000	220.648.844.393	229.082.759.880	237.796.037.217	252.597.661.000	256.367.624.376	249.887.753.000	254.565.494.048	264.173.859.056	273.357.887.924
	DANA RUTIN	42.948.742.000	40.626.371.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	4.564.076.000	6.437.410.996	6.904.764.000	8.765.316.393	8.697.419.880	12.258.814.781	13.604.453.000	16.321.180.560	14.763.350.000	17.812.067.057	15.400.924.800	21.394.409.256
	DANA ALOKASI UMUM	5.902.603.000	5.815.371.732	211.883.526.000	211.893.526.000	211.880.000.000	212.735.649.916	224.887.581.000	224.887.874.834	222.400.000.000	222.399.000.000	222.826.000.000	222.826.000.000
	DANA ALOKASI KHUSUS	4.952.603.000	5.008.880.177	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	12.510.000.000	12.510.000.000
	BAGI HASIL PAJAK/BANTUAN KEU. PPROP.	-	-	-	-	8.505.340.000	12.801.572.520	13.105.627.000	14.158.568.982	12.724.403.000	14.354.426.989	13.436.934.256	16.627.478.668
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	1.913.895.800	2.130.739.984	3.992.970.000	7.473.988.195	-	-	-	-	2.236.405.000	2.392.582.448	9.721.000.000	9.721.000.000
	JUMLAH	65.908.164.800	65.753.567.218	234.917.260.000	242.491.610.736	246.292.759.880	259.180.918.548	272.700.661.000	279.676.191.991	275.012.138.500	280.568.879.136	295.251.063.546	306.379.928.730



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. R.A. Kartini No. 1 Telp./Fax. (0285) 391131, 392131 Batang 51215

SURAT REKOMENDASI SURVEY

No : 072/ 13 /2005

- I. **DASAR** : Surat dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/72.
- II. **MENARIK** : Surat dari Bakesbangtibliinmas Kabupaten Batang tanggal 29 Juni 2006 Nomor : 072/30/VI/06 perihal Rekomendasi Riset/Survey/Praktek.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan riset di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ARDIYANTO PRIYATMOJO**
 2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
 3. Alamat : **Dracik Kampus No.38 RT.01 RW .01 Proyo Selatan Batang.**
 4. Penanggungjawab : **Ag Edi Sutarto,SE .M.Si.**
 5. Maksud & tujuan : **Permohonan Rekomendasi Ijin Riset dengan judul "ANALIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG".**
 6. Lokasi : **Kabupaten Batang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan riset langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa daerah setempat;
 - c. Setelah riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.
- IV. Surat Ijin Riset ini berlaku dari tanggal 29 Juni 2006 s/d 29 Juli 2006.

DIKELUARKAN DI : **B A T A N G**
PADA TANGGAL : **29 Juni 2006**

A.n BUPATI BATANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG
Ub. Kabid Litbang



Ag Mulyadi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 070 024 286

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Ka. Bakesbangtibliinmas Kab. Batang;
2. Kabag Keuangan Setda Kab. Batang;
3. Ka. BPS Kab. Batang.
4. A r s i p .